

Artikel penelitian

Analisis Ketahanan Pangan Wilayah di Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali

Hasmiati^a, Sitti Rahma Ma'muna^{*}, Bambang Indro Yuwono^a

^a Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Kendari

Abstract

Food availability is very important in determining the food security of a region. However, the availability of food alone is not enough to determine the level of food security. This study aimed to measure the level of regional food security by using a composite index. This research was conducted in Bungku Tengah subdistrict from April to May 2014. This study used secondary data from the Central Statistics Agency (BPS) and the Food Agency of Morowali Regency, as well as field observations. The observed data includes three aspects, namely food production, distribution and consumption aspects. The data analysis technique used in this research is the food access analysis guide from the Food Security Agency in 2008.

The results shows that the composite index of the three aspects of food security is quite high. Aspects of distribution, education and the availability of market facilities contribute to the combined value. However, if viewed from the aspect of availability, local production is still in deficit and income levels are classified as low so that it has the potential to cause food insecurity in the area. Programs to increase the planted area and intensification need to be pursued to increase production. Likewise, is needed food diversification to reduce dependence on rice.

Keywords: Regional food security, food access, composite index

Abstrak

Ketersediaan pangan sangat penting dalam menentukan ketahanan pangan suatu wilayah. Akan tetapi ketersediaan pangan saja tidak cukup untuk menentukan tingkat ketahanan pangan wilayah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat ketahanan pangan wilayah dengan menggunakan nilai komposit gabungan. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Bungku Tengah dari bulan April sampai Mei 2014. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Morowali, serta observasi lapangan. Data yang diamati meliputi tiga aspek yaitu produksi bahan makanan, distribusi dan aspek konsumsi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah panduan analisis akses pangan dari Badan Ketahanan Pangan tahun 2008.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari nilai komposit/gabungan dari ketiga aspek ketahanan pangan tergolong cukup tinggi. Aspek distribusi, pendidikan serta tersedianya fasilitas pasar sebagai berkontribusi pada nilai gabungan tersebut. Akan tetapi jika dilihat dari aspek ketersediaan, terlihat bahwa produksi lokal masih defisit serta sedangkan tingkat pendapatan tergolong rendah sehingga berpotensi pada menimbulkan kerawanan pangan. Program peningkatan luas areal tanam dan intensifikasi perlu diupayakan mengingkatkan produksi. Demikian pula diversifikasi pangan perlu dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap beras.

Kata kunci: Ketahanan pangan wilayah, kemandirian pangan

Artikel Penelitian

*Korespondensi:

Sitti Rahma Ma'mun
 Fakultas Pertanian
 Universitas Muhammadiyah Kendari
 Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 10 Kel.
 Wawowanggu, Kendari, Sulawesi
 Tenggara, Indonesia. 93117.
 rahma.mamun@umkendari.ac.id

Situs artikel:

Hasmiati, S.R. Ma'mun, Asriani,
 (2018). Analisis Ketahanan Pangan
 Wilayah di Kecamatan Bungku
 Tengah Kabupaten Morowali.
Agrisurya, Vol. 1 (2), 10-23.

DOI:

<https://doi.org/10.51454/agrisurya.v1i2.101>

I. PENDAHULUAN

Pangan adalah kebutuhan dasar manusia paling utama, karena itu pemenuhan pangan merupakan bagian dari hak asasi individu. Pemenuhan pangan juga sangat penting sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia berkualitas. Mengingat pentingnya pemenuhan kecukupan pangan, setiap negara akan mendahulukan pembangunan ketahanan pangannya sebagai fondasi bagi pembangunan sektor-sektor lainnya.

Di Indonesia, tujuan pembangunan ketahanan pangan adalah menjamin ketersediaan dan konsumsi pangan cukup, aman, bermutu dan bergizi seimbang baik pada tingkat nasional, daerah dan rumah tangga secara merata dan sepanjang waktu. Mengingat pangan juga merupakan komoditas ekonomi maka pengembangannya dikaitkan dengan peluang pasar dan peningkatan daya saing yang dibentuk dari keunggulan spesifik lokasi, keunggulan kualitas serta efisiensi dengan penerapan teknologi inovatif (BKP, 2005).

Sejak 1997 pemerintah mulai menerapkan kebijakan baru berupa program Jaring Pengaman Sosial, yang lebih dikenal dengan pembagian bantuan RASKIN (beras untuk rakyat miskin), yaitu beras untuk rumah tangga miskin dengan harga subsidi di tingkat pedesaan/kelurahan. Pembagian Raskin memperoleh sambutan yang luar biasa baik yang pro maupun kontra namun yang kontra khususnya menyoroti pada aspek penyaluran yang dianggap tidak tepat sasaran baik karena definisi kemiskinan yang berbeda-beda maupun karena adanya penyelewengan pendistribusian.

Salah satu wilayah di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah yang menerima program Raskin adalah Kecamatan Bungku Tengah yang mengisyaratkan kondisi kekurangan pangan di daerah tersebut. Namun seberapa rendah kondisi kekurangan pangan yang dialami dan kelayakan pendistribusian raskin di wilayah tersebut belum diketahui sehingga perlu dilakukan suatu kajian mengenai ketahanan pangan wilayah Kecamatan Bungku Tengah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketahanan pangan wilayah Kecamatan Bungku Tengah, khususnya dari aspek ketersedian dan keterjangkauan pangan melalui produksi domestik. Penelitian ini bermanfaat guna memberikan informasi bagi pengambil kebijakan dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan wilayah dan mewujudkan Desa Mandiri Pangan di Kecamatan Bungku Tengah.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Ketahanan pangan merupakan suatu kondisi ketersediaan pangan yang cukup bagi setiap orang pada setiap saat dan setiap individu yang mempunyai akses untuk memperolehnya baik secara fisik maupun ekonomi (Soetrisno, 1998). Fokus ketahanan pangan tidak hanya pada penyediaan pangan tingkat wilayah tetapi juga penyediaan dan konsumsi pangan tingkat daerah dan rumah tangga bahkan individu dalam memenuhi kebutuhan gizinya. Dalam program Pembangunan Pertanian, Kabinet Persatuan Nasional dijelaskan bahwa ketahanan pangan mencakup tingkat rumah tangga dan tingkat nasional/regional.

Berdasarkan Undang-undang Pangan No. 18 Tahun 2012, ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Dari pengertian ini jelas bahwa ketahanan pangan bukan saja swasembada pangan tapi lebih ditekankan pada aspek manusianya (rumah tangga). Pengertian ini adalah sejalan dengan makna dari UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 9 ayat (1) menyebutkan “setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya”.

Ketersediaan pangan merupakan salah satu dimensi utama ketahanan pangan yang sering digunakan sebagai tolak ukur ketahanan pangan wilayah. Pendekatan ini menitikberatkan pada keseimbangan atau ketidakseimbangan antara populasi dan bahan makanan. Untuk menjaga keseimbangan ini, pertumbuhan tingkat ketersediaan pangan tidak boleh lebih rendah dari tingkat pertumbuhan populasi (Burchi dan De Muro, 2016). Menghadapi pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dari tahun ke tahun, peningkatan ketersediaan pangan menjadi sangat penting

Peningkatan produksi pangan dapat meningkatkan ketahanan pangan dengan menyediakan pangan dengan harga yang murah bagi konsumen (Grafton dkk, 2015). Namun demikian aspek ketersediaan tidak cukup menggambarkan ketahanan pangan, karena pada akhirnya bagaimana pangan tersebut terdistribusi dan diakses oleh masyarakat yang menggambarkan kondisi yang sesungguhnya (Qureshi dkk, 2015).

2.1. Kemandirian Pangan dan Akses Pangan

Pada tatanan nasional kemandirian pangan diartikan sebagai kemampuan suatu bangsa untuk menjamin seluruh penduduk memperoleh pangan dalam jumlah yang cukup, mutu yang layak, aman dan halal didasarkan pada optimasi pemanfaatan dan berbasis pada keragaman sumberdaya domestik. Salah satu indikator yang dapat mengukur kemandirian pangan adalah besaran ketergantungan impor terhadap ketersediaan pangan lokal.

Menurut Andibya, (2009) ketahanan pangan tidak hanya mencakup pengertian ketersediaan pangan yang cukup, namun juga kemampuan untuk mengakses (termasuk membeli) pangan dan tidak terjadinya ketergantungan pangan pada pihak manapun. Dalam hal ini petani memiliki kedudukan yang strategis dalam ketahanan pangan, karena petani adalah produsen pangan sekaligus kelompok konsumen terbesar yang sebagian masih miskin dan membutuhkan daya beli yang cukup untuk membeli pangan.

Kaitan dengan hal tersebut maka kondisi yang mendukung akses pangan bagi masyarakat sangat penting, dan berdasarkan pengertian ketahanan pangan maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa ada 3 (tiga) subsistem yang terlibat dalam mendukung akses pangan bagi masyarakat yaitu subsistem ketersediaan, subsistem distribusi dan subsistem konsumsi. Kinerja dari ketiga subsistem akan dapat dilihat dari aspek stabilitas dan kecukupan pasokan pangan, aspek keterjangkauan pangan oleh masyarakat dan aspek pemanfaatan pangan oleh masyarakat termasuk pengaturan menu dan distribusi pangan dalam keluarga. Terwujudnya kemandirian pangan antara lain ditandai oleh indikator makro yaitu pangan tersedia, terdistribusi dan dikonsumsi dengan kualitas gizi yang berimbang pada tingkat wilayah dan nasional. Dan secara mikro yaitu pangan terjangkau secara langsung oleh masyarakat dan rumah tangga.

2.2. Aspek Subsisten Ketersediaan

Ketersediaan pangan adalah tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan sumber lain. Ketersediaan pangan menurut PP No. 68 Tahun 2002 harus diutamakan bersumber dari dalam negeri. Selain itu pada Pasal 3 PP No. 68 tahun 2002 menyatakan bahwa sumber penyediaan pangan berasal dari produksi pangan dalam negeri, cadangan pangan, dan pemasukan pangan.

Menurut Nainggolan (2008) saat ini upaya memenuhi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri akibat peningkatan penduduk dihadapkan pada berbagai persoalan seperti : (1). Konversi lahan pertanian ke penggunaan non petanian; (2). Menurunnya kualitas dan kesuburan lahan akibat kerusakan lingkungan; (3). Rusaknya sekitar 30% prasarana pengairan; (4). Infrastruktur pedesaan yang tidak baik; (5). Pemilik lahan pertanian yang sempit. Hal yang senada oleh Sumodinigrat (2005) dengan menambahkan bahwa ada juga faktor menurunnya gairah berproduksi dari para petani akibat makin mahalnya sarana produksi dan rendahnya nilai jual yang ditunjukkan dengan rendahnya Nilai Tukar Petani (NTP). Dalam hal ini Nainggolan (2008) menyebutkan akibat adanya akses globalisasi yang menyebabkan masuknya produk pertanian dari luar negeri (barang impor) yang lebih murah karena sistem subsidi di negara asal yang luar biasa besarnya, sehingga produk pertanian Indonesia lebih mahal/kurang laku yang akhirnya mengurangi gairah berproduksi petani Indonesia.

Secara nasional ketersediaan energi sudah melebihi Angka Kecukupan Energi (AKE) maupun Angka Kecukupan Protein (AKP) yang dianjurkan (BKP, 2006c dan 2006d). Permasalahannya AKE dan AKP tersebut diperoleh dari seluruh komoditi pangan tidak saja beras, sementara anggapan umum semua dipadankan dengan beras. Padahal sesuai dengan anjuran dalam Pola Pangan Harapan (PPH) yang ideal kontribusi kalori dari padi-padian maksimal 50%. Menurut Nuhung (2006) dan Nainggolan (2008) persoalan tersebut dapat diatasi dengan mengikis anggapan bahwa mengkonsumsi non beras adalah sifat *inferior* (hanya untuk si miskin) sehingga budaya makan makanan tradisional setempat harus terus dibudayakan seperti kebiasaan makan ubi kayu (*tiwil* di Gunung Kidul Yogyakarta, *kasuami* di Muna/Buton Sulawesi) atau sagu di Papua, Ambon dan Kendari (Sulawesi Tenggara), jagung di Madura, Gorontalo dan Muna/Buton dan lain-lain demi peningkatan ketahanan pangan secara lokalitas (desa mandiri pangan).

2.3. Aspek/Subsitem Distribusi

Sifat usaha pertanian, letak geografis, sifat produk pertanian yang musiman, pola tanam, pola panen dan sifat tanaman sangat menentukan sistem distribusi yang harus dikembangkan. Mosher (1974) menyatakan bahwa untuk menciptakan struktur pedesaan yang progresif dalam pembangunan pertanian salah satu unsur yang penting adalah terciptanya jalan-jalan pedesaan untuk memperlancar

dan menekan biaya pengangkutan hasil serta untuk penyaluran informasi dan segala jasa-jasa di daerah pedesaan. Sementara itu Soekartawi (2002) dan Nuhung (2006) menyatakan bahwa kebijakan non harga yang dapat menunjang pembangunan pertanian antara lain adalah kebijakan pembangunan infrastruktur pertanian seperti jalan, irigasi, pelabuhan, transportasi, listrik pergudangan, komunikasi dan lain-lain di sentra-sentra produksi. Pendapat-pendapat tersebut menunjukkan bahwa faktor sarana perhubungan baik berupa jalan maupun komunikasi akan menunjang kelancaran distribusi pangan dan ketepatan waktu tibanya bahan pangan yang diangkut. Oleh sebab itu siapapun dan instansi manapun yang menangani pembangunan infrastruktur tersebut harus terkoordinasi dengan program pembangunan pertanian/ketahanan pangan.

Nuhung, (2006) menyatakan bahwa sistem distribusi menyangkut berbagai aspek, yaitu : (1). Aspek komoditas yang didistribusikan yang memerlukan persiapan, *treatment* dan pengamanan yang berbeda. (2). Aspek alat transportasi yang mencakup alat transportasi laut, darat dan udara yang harus dirancang untuk memenuhi persyaratan tertentu sesuai dengan komoditas, seperti *cold storage* dan lain-lain. (3). Kondisi jalan dan jarak maupun waktu tempuh akan mempengaruhi kualitas dan ketepatan waktu sampainya bahan di tempat tujuan. Namun demikian kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah dalam memberi prioritas bagi distribusi bahan pangan akan sangat menentukan termasuk adalah menghapus pungutan-pungutan atau restribusi yang resmi maupun tidak resmi selama dalam proses pendistribusian.

2.4. Aspek/Subsistem Konsumsi (Sosial Ekonomi)

Subsistem konsumsi pada hakekatnya berfungsi mengarahkan agar pola pemanfaatan pangan secara nasional memenuhi kaidah mutu, keragaman, kandungan, gizi, keamanan dan kehalalan serta peningkatan efisiensi untuk mencegah pemborosan. Dampak buruk kerawanan pangan terlihat pada penurunan strata gizi masyarakat dan strata kesehatan masyarakat yang akhirnya menimbulkan bencana kelaparan. Dampak buruk terganggunya ketersediaan pangan dan berkurangnya daya beli masyarakat menimbulkan kemiskinan struktural sehingga dengan usaha apapun pendapatannya tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarganya.

Acuan kuantitatif untuk konsumsi pangan adalah Angka Kecukupan Gizi (AKG) rekomendasi Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) ke VIII

tahun 2004 untuk energi adalah 2.000 kkal dan untuk protein 52 gram dalam satuan rata-rata per kapita per hari. Sedangkan acuan untuk menilai tingkat keragaman konsumsi pangan adalah dengan pendekatan nilai Pola Pangan Harapan (PPH) yang menunjukkan susunan keragaman pangan atau kelompok pangan yang didasarkan pada sumbangan energinya terhadap total energi, baik mutlak maupun relatif ditingkat ketersediaan atau konsumsi pangan penduduk secara kuantitas maupun keberagamannya (BKP, 2006c).

Kondisi sosial ekonomi masyarakat akan sangat menentukan bagaimana persepsi dan upaya serta kemampuan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi keluarganya sesuai dengan pola konsumsi yang ideal termasuk tingkat pendidikan, besarnya tanggungan keluarga, jumlah tenaga kerja produktif keluarga, anggota keluarga yang bekerja sesuai norma yang normal, keberadaan pasar, tingkat kemiskinan dan pendapatan per kapita. Tingkat pendidikan akan berpengaruh dalam pemilihan jenis dan keragaman yang akan dikonsumsi secara teoritis makin tinggi pendidikan makin ideal pola konsumsinya. Besarnya tanggungan keluarga juga akan berpengaruh dalam pemenuhan konsumsi yang ideal dimana makin besar tanggungan keluarga cenderung makin kurang keragaman konsumsinya. Sebaliknya makin besar tingkat pendapatan akan meningkatkan permintaan yang diwujudkan dengan makin beragamnya jenis konsumsi maupun tuntutan kualitas, sementara tingkat pendapatan berkorelasi positif dengan jumlah anggota keluarga produktif yang bekerja. Namun demikian keseluruhan aspek tadi juga dipengaruhi oleh ada tidaknya pasar dan jarak pasar terhadap konsumen/rumah tangga dekat karena pasar yang tidak ada atau ada di tempat yang jauh ataupun kondisi jalan yang tidak aman/nyaman akan menyebabkan kurangnya minat untuk berbelanja (Mosher 1974, Soekartawi 2002, Nuhung 2006 dan Nainggolan 2008).

III. METODE PENELITIAN

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April sampai Mei 2014 di Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali. Pemilihan tempat penelitian dilaksanakan secara sengaja (*purposive*) karena tempat tersebut setiap tahunnya memperoleh bantuan Program Raskin sementara kondisi pertanian tidak mencerminkan kerawanan pangan.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder tahun 2013. data sekunder diperoleh yang dari dokumen resmi pada institusi yang relevan yaitu Kantor Desa, Kantor Dinas Pendidikan, Kantor Dinas Sosial, Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Morowali, Badan Ketahanan Pangan Daerah, Dinas Pertanian, Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan lain-lain.

Variabel yang diamati dan diukur dalam penelitian ini adalah :

- Aspek ketersediaan pangan yang mencakup data produksi dari bahan makanan pokok yaitu padi, jagung, ubi kayu dan ubi jalar.
- Aspek distribusi yang mencakup infrastruktur pendukung transportasi/jalan.
- Aspek konsumsi (sosial ekonomi) masyarakat yang mencakup tingkat pendidikan, pasar, penduduk miskin, jam kerja dan nilai produk ekonomi kerakyatan.

3.3. Analisis Data

Untuk mengetahui seluruh nilai akses pangan digunakan metodologi yang mengacu dari panduan Analisis Akses Pangan untuk Tingkat Propinsi yang dikeluarkan oleh Departemen Pertanian Republik Indonesia/Badan Ketahanan Pangan, 2008. Namun dalam penelitian ini panduan disesuaikan dengan kondisi untuk tingkat kecamatan, sehingga diperoleh rancangan/metode analisis sebagai berikut.

Analisis Data Parsial

Dalam analisis data parsial dianalisis aspek ketersediaan, aspek distribusi dan aspek konsumsi (sosial-ekonomi) masyarakat dan wilayah.

Aspek Ketersediaan Pangan

Sebagai indikator ketersediaan pangan digunakan proporsi konsumsi normatif terhadap ketersediaan bersih padi, jagung dan umbi-umbian yang layak dikonsumsi manusia. Konsumsi normatif (Cnorm) adalah jumlah pangan yang harus dikonsumsi per orang per hari untuk memperoleh kilo kalori energi. Standar kebutuhan kalori per hari per kapita adalah 2.200 kkal yang harus di penuhi dari bahan yang dikonsumsi dan untuk itu pola pangan yang ideal adalah 50% atau mengkonsumsi kurang lebih 300 gram serealia per hari. Atas perhitungan tersebut maka dapat diketahui kondisi ketersediaan pangan di suatu daerah (surplus atau defisit). Untuk memperhitungkan ketersediaan pangan dari masing-masing komoditi digunakan analisis sebagai berikut:

Padi. Ketersediaan Netto padi di ambil dari data produksi padi dikurangi data untuk keperluan bibit, pakan, dan tercecer dengan nilai konversi masing-masing adalah 0,0088, 0,02 dan 0,054. Selanjutnya untuk memperoleh produksi netto beras (R_{net}) dengan mengalikan netto padi dengan faktor konversi sebesar 63,2%.

Jagung. Perlu dipahami bahwa sebagian hasil produksi jagung juga akan digunakan untuk bibit dan pakan ternak, sehingga untuk memperoleh produksi netto jagung harus dikalikan dengan faktor konversi sebesar 0,6. Selanjutnya untuk memperoleh rasio konsumsi normatif jagung (M_{net}) maka produksi netto jagung harus disetarakan dengan kalori beras, yaitu melalui perkalian dengan faktor konversi sebesar 0,77.

Ubi Kayu. Ketersediaan produksi ubi kayu diambil dari data produksi ubi kayu dikurangi data untuk keperluan pakan, dan tercecer dengan nilai konversi masing-masing adalah 2% dan 13%. Sedang data ketersediaan netto ubi kayu lepas kulit untuk konsumsi dikalikan dengan faktor konversi sebesar 28%. Selanjutnya untuk memperoleh rasio konsumsi normatif ubi kayu (UK_{net}) maka produksi netto ubi kayu harus disetarakan dengan kalori beras, yaitu melalui perkalian dengan faktor konversi sebesar 0,3.

Ubi Jalar. Ketersediaan produksi ubi jalar di ambil dari data produksi ubi jalar dikurangi data untuk keperluan pakan, dan tercecer dengan nilai konversi masing-masing adalah 2% dan 1%. Sedang data ketersediaan netto ubi jalar untuk konsumsi dikalikan faktor konversi sebesar 14%. Selanjutnya untuk memperoleh rasio konsumsi normatif ubi jalar (UJ_{net}) maka produksi netto ubi jalar harus disetarakan dengan kalori beras, yaitu melalui perkalian dengan faktor konversi sebesar 0,29. Produksi Netto Pangan Pokok (padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar) atau P_{food} :

$$P_{food} = R_{net} + M_{net} + UK_{net} + UJ_{net}$$

Perhitungan Ketersediaan Pangan Biji-Bijian (F) per kapita per hari dilakukan dengan membagi P_{food} dengan total penduduk kali 365 hari, dalam satuan gram.

$$F = \frac{P_{food}}{\text{Jumlah Penduduk} \times 365}$$

Perhitungan Rasio Ketersediaan Pangan (I_{AV}) dilakukan dengan membagi Cnorm dengan Ketersediaan Pangan Serealia (F)

$$I_{AV} = \frac{C_{norm}}{F}$$

Jika nilai $I_{AV} > 1$, maka daerah tersebut defisit pangan serealia, dan jika $I_{AV} < 1$ maka daerah tersebut surplus dengan serealia.

Aspek Distribusi

Indikator yang digunakan dalam aspek distribusi adalah kondisi infrastruktur jalan mengingat bahwa sarana tersebut paling penting untuk perhubungan/ transportasi darat. Kondisi jalan yang baik akan memberikan akses yang baik ke pasar bagi produsen/petani, penjual dan pembeli di samping itu jalan juga memudahkan seseorang untuk mengakses pelayanan dasar lain seperti pendidikan, kesehatan dan lain-lain yang sangat penting untuk memperbaiki standar kehidupan, karena itu semakin baik jalan di suatu wilayah maka semakin baik pula akses pangannya.

Dalam hal ini persentase desa/dusun yang tidak dapat dilalui kendaraan roda empat, digunakan sebagai indikator yang mewakili akses/infrastruktur jalan dalam aspek distribusi. Jika persentase desa/dusun yang tidak dilalui roda empat $> 20\%$ maka akses pangannya dikategorikan rendah. Indikator selengkapnya ada pada Lampiran 1.

Aspek Sosial Ekonomi

Aspek sosial diwakili oleh indikator persentase penduduk yang tidak tamat pendidikan dasar (SD). Jika persentasi penduduk yang tidak tamat SD lebih dari 30% maka akses pangannya digolongkan dalam kategori rendah.

Aspek ekonomi diwakili oleh empat indikator yaitu (1) indikator persentase desa yang tidak mempunyai pasar atau jarak terdekat ke pasar minimum 3 km dengan kriteria jika persentase lebih dari 37,5% maka akses pangannya dikategorikan rendah. Indikator selengkapnya ada pada Lampiran 1. (2) indikator persentase yang hidup dibawah garis kemiskinan, jika persentasenya lebih dari 20% maka akses pangannya dikategorikan rendah. (3) Indikator persentase penduduk yang bekerja kurang dari 36 jam per minggu, jika persentasenya lebih dari 30% maka akses pangannya masuk dalam kategori rendah, indikator selengkapnya ada pada Lampiran 1. Dan (4) Produk Ekonomi Kerakyatan per kapita artinya yang digunakan dalam penelitian adalah PDRB dari lapangan usaha yang dikelola oleh masyarakat yang pemasukannya untuk masyarakat, jika tingkat pendapatan penduduk lebih kecil dari 1.095 \$ per

tahun maka akses pangannya dikategorikan rendah (asumsi \$ 1 = Rp 11.500).

Analisis Data Gabungan/Komposit

Setelah ditemukan range/kategori masing-masing indikator per jenis aspek maka untuk keseragaman satuan, data harus diubah/dikonversi ke dalam suatu indeks/bobot yang menggunakan skala 10 sampai 100. Dimana akses pangan sangat rendah diberi bobot 10; akses pangan rendah diberi bobot 20; akses pangan cukup rendah 40; akses pangan cukup tinggi 60; akses pangan tinggi 80 dan akses pangan sangat tinggi 100. Untuk mengetahui tingkatan akses pangan secara utuh/holistik maka setiap indeks/bobot indikator selanjutnya digabungkan dan dirata-ratakan sehingga diperoleh indeks gabungan (indeks pangan komposit).

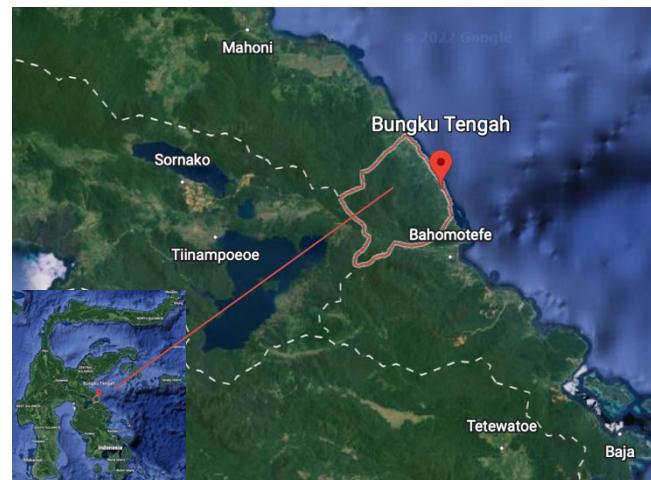
Adapun rentang indeks akses pangan dan kategori komposit adalah sebagai berikut :

| | |
|--------------|------------------------------|
| ≤ 16 | : akses pangan sangat rendah |
| $< 16 - 32$ | : akses pangan rendah |
| $< 32 - 48$ | : akses pangan cukup rendah |
| $< 48 - 64$ | : akses pangan cukup tinggi |
| $< 64 - 80$ | : akses pangan tinggi |
| $< 80 - 100$ | : akses pangan sangat tinggi |

Sumber : Halik, A (2007)

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian



Gambar 1. Peta lokasi penelitian (Sumber: Google earth)

Luas wilayah Kecamatan Bungku Tengah adalah 725,57 km² yang terdiri dari 53,42% daratan, 13,68% perbukitan dan 32,63% pegunungan. Sebelum adanya pemekaran pada tahun 2012 Kecamatan Bungku

Tengah terdiri dari hampir 30 desa/kelurahan. Namun, karena adanya pemekaran pada tahun 2012 maka Kecamatan Bungku Tengah dimekarkan menjadi Kecamatan Bungku Tengah dan Bungku Timur. Kecamatan Bungku Tengah terdiri dari 13 desa dan 6 kelurahan. Pada tahun 2012 jumlah penduduk adalah 20.684 jiwa terdiri dari 4.990 Rumah Tangga (RT).

4.1. Kondisi Pertanian Secara Umum

Luas penggunaan lahan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Luas Panen dan Produksi Tanaman Utama di Kecamatan Bungku Tengah, Tahun 2012

| No. | Komoditi | Luas Lahan (Ha) | Produksi (ton) |
|-----|------------------|-----------------|----------------|
| 1. | Padi sawah (GKG) | 149 | 566,20 |
| 2. | Jagung | 42 | 180,60 |
| 3. | Ubi Kayu | 22 | 528,00 |
| 4. | Ubi Jalar | 6 | 63,00 |
| 5. | Kacang Tanah | 11 | 16,40 |
| 6. | Kacang Hijau | 8 | 6,40 |
| 7. | Kakao | 1.496 | 211,00 |
| 8. | Cengkeh | 522 | 28,00 |
| 9. | Kelapa | 396 | 25.150,00 |
| 10. | Jambu Mete | 282 | 56,00 |

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Morowali, 2013 (diolah).

Luas penggunaan lahan pada tahun 2012 adalah 72.607 ha meliputi jenis penggunaan lahan sawah, lahan bangunan dan pekarangan, tanah tegalan/kebun, tanah ladang/huma, perkebunan, hutan rakyat, tambak, kolam/empang, tanah penggembalaan (padang rumput), tidak diusahakan, hutan negara, tanah rawa yang tidak ditanami dan peruntukan lainnya. Menurut data BPS (2012) dari jumlah tersebut penggunaan terluas adalah untuk hutan negara yaitu seluas 66.969 ha atau 92,23% dari seluruh luas tanah Kecamatan Bungku Tengah, artinya bahwa hampir keseluruhan dari luas wilayah Kecamatan Bungku Tengah digunakan untuk hutan negara. Kemudian terluas kedua adalah perkebunan sebesar 3.057 ha atau 4,21% dan ketiga adalah tanah rawa yang tidak ditanami yaitu 1.450 ha atau 1,99%. Ini memberi gambaran bahwa penggunaan/ pemanfaatan lahan untuk pertanian masih sangat kurang peruntukannya. Sehingga perlu adanya upaya perluasan lahan pertanian.

Komoditi utama yang ditanam untuk tanaman pangan/semusim adalah padi sawah, jagung, ubi kayu,

ubi jalar, kacang tanah, dan kacang hijau, sedangkan untuk tanaman perkebunan adalah kakao, cengkeh, kelapa, jambu mete, durian dan pala. Usaha peternakan masih bersifat subsisten dengan komoditi ayam kampung, kambing, sapi, itik, dan kerbau. Sementara perikanan sampai saat ini masih kurang dalam pengembangan dan pembudidayaan baik ikan air laut maupun ikan air tawar, padahal potensi untuk pengembangan budidaya ikan air laut sangat potensial didukung oleh perairan laut yang sangat baik dan hampir kebanyakan desa berada pada sekitar pesisir pantai/laut.

4.2. Aspek Ketersediaan

Ketersediaan pangan di Kecamatan Bungku Tengah berasal dari produksi dalam kecamatan maupun didatangkan dari daerah lain seperti wilayah Sulawesi Selatan dan daerah di luar Kecamatan Bungku Tengah termasuk seperti raskin, mie instan dan jagung. Namun karena sesuai dengan tujuan penelitian yaitu menilai kemampuan daerah maka ketersediaan bahan makanan yang didatangkan tidak diperhitungkan dalam analisis sehingga dalam perhitungannya hanya menggunakan data produksi dalam daerah Bungku Tengah khususnya bahan makanan yang merupakan bahan makanan pokok kalori harian dari tanaman pangan utama yaitu padi, jagung, ubi kayu dan ubi jalar. Karena diasumsikan inilah bahan pangan utama masyarakat Indonesia yang dapat menunjukkan tingkat keswasembadaan pangan suatu daerah.

Ketersediaan per kapita per hari diperoleh dari jumlah produksi bersih setara beras dalam satuan gram di bagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun dikalikan 365 hari, sehingga diperoleh perhitungan sebagai berikut :

Ketersediaan per kapita per hari

$$= \frac{966,71 \times 1.000.000}{(20.300 + 20.684) : 2} \times 365 = 129,29 \text{ gram}$$

sehingga rasio ketersediaan dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ketersediaan Pangan} = \frac{300}{129,29} = 2,32$$

Berdasarkan Rasio Ketersediaan Pangan tersebut lebih besar dari 1 maka tingkat akses pangan dari aspek ketersediaan di Kecamatan Bungku Tengah tergolong defisit dan masuk kriteria sangat rendah dengan angka/skor bobot adalah 0 (nol).

Apabila dilihat secara parsial maka dapat diketahui bahwa ketersediaan beras di Kecamatan Bungku Tengah adalah sebanyak 39,48 kg per kapita per tahun dengan perhitungan ketersediaan (808,81 ton x 1000 kg) dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun sebanyak 20.492 jiwa. Jadi sesungguhnya dari angka ketersediaan beras saja memang Kecamatan Bungku belum dapat memenuhi kecukupan pangan bagi warganya, karena rata-rata konsumsi beras per kapita per tahun penduduk Sulawesi Tengah hanya 98 kg/kapita/tahun bahkan ini belum atau masih dibawah tingkat konsumsi secara Nasional sebesar 113,7 kg/kapita/tahun (BPS, 2011). Oleh karena itu peningkatan luas area akan meningkatkan ketahanan pangan wilayah Kecamatan Bungku Tengah,

Tabel 2. Hasil Analisis Ketersediaan Bahan Makanan Utama Kecamatan Bungku Tengah, Tahun 2012.

| No. | Komoditi | Produksi 2011 (ton) | Produksi 2012 (ton) | Rata-Rata Produksi/Th (ton) | Produksi Bersih (ton) | Setara Beras Bersih (ton) |
|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1 | Padi (GKG) | 2.29 | 566,20 | 1.428,1 | 1.320,94 | 808,81 |
| 2 | Jagung (biji) | 159,80 | 180,60 | 250,1 | 132,36 | 101,92 |
| 3 | Ubi Kayu | 713 | 528 | 620,5 | 147,68 | 44,30 |
| 4 | Ubi Jalar | 265 | 63 | 296,5 | 40,31 | 11,68 |
| Jumlah Ketersediaan | | | | | | 966,71 |

Keterangan:

- Konversi Gabah Kering Giling (GKG) ke beras adalah 63,2%, ketersediaan bersih setara beras dari gabah sudah dikurangi susut.
- Konversi Jagung (biji) ke beras = berat bersih x 0,77
- Konversi Ubi Kayu ke beras = berat bersih x 0,30
- Konversi Ubi Jalar ke beras = berat bersih x 0,29

sebagaimana wilayah lain di Indonesia (Widada, dkk., 2017).

dari perdagangan di luar daerah seperti Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara.

4.3. Aspek Distribusi

Akses jalan juga merupakan infrastruktur penghubung yang penting terhadap pertumbuhan suatu daerah, termasuk akses terhadap pangan oleh sebab itu pada analisis terhadap aspek distribusi digunakan pendekatan kondisi jalan, khususnya jalan yang memungkinkan dilalui oleh kendaraan roda 4 atau lebih karena diasumsikan pendistribusian pangan atau proses transportasi dalam pemasaran selalu akan lebih efisien dengan kendaraan roda 4.

Hampir seluruh desa di Kecamatan Bungku Tengah dapat dilalui kendaraan roda 4 kecuali di desa yaitu Desa Puungkoilu dan Desa Tudua di mana masih

Lebih lanjut bila ditinjau secara gabungan dari produksi seluruh komoditi bahan pangan yang disetarakan dengan beras maka tingkat ketersediaan pangan adalah 47,92 kg/kapita/hari. Maka dari hasil perhitungan diatas maka pihak pemerintah perlu melakukan penyaluran bantuan beras miskin (RASKIN), selain itu juga perlu adanya upaya peningkatan luas lahan dan produksi yang diharapkan dapat memenuhi ketersediaan pangan di Kecamatan Bungku Tengah.

Berdasarkan hasil analisis di atas menunjukkan bahwa produksi dalam negeri/wilayah tidak mampu mencukupi kebutuhan masyarakat Kecamatan Bungku Tengah, sehingga masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan terutama beras didapat

terdapat dusun yang tidak dapat dilalui kendaraan roda 4 karena luas jalan tidak memadai, dengan persentase 5,88%. Namun kondisi ini tidak mempengaruhi skor karena diasumsikan bahwa tingkat kesulitan masyarakat untuk mendatangi pusat desa/ pusat distribusi sangat kecil dengan jarak jangkauan kurang dari 3 km sehingga dapat digolongkan tingkat akses pangan dari aspek distribusi termasuk dalam kriteria sangat tinggi dengan range < 10% atau score bobot 100.

4.4. Aspek Sosial Ekonomi

Dalam aspek ini terdiri dari 2 (dua) sub aspek, yaitu sub aspek sosial yang diwakili oleh indikator presentase penduduk yang tidak tamat SD, dan sub aspek ekonomi yang akan diwakili oleh 4 (empat) indikator

yaitu (1). Persentase desa yang tidak memiliki pasar atau jarak terdekat minimum 3 km, (2). Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan, (3). Persentase penduduk yang bekerja kurang dari 36 jam per minggu, dan (4) Pendapatan per kapita ekonomi kerakyatan penduduk.

4.5 Penduduk Tidak Tamat Sekolah Dasar (SD)

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan serta diakui sebagai kebutuhan pokok manusia secara keseluruhan, semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat semakin baik kualitas sumber dayanya. Ketidakmampuan menyelesaikan pendidikan dasar dapat dikatakan sebagai akibat dari kemiskinan yang menyebabkan ketidakmampuan untuk memenuhi biaya pendidikan. Alasan lain adalah jauhnya jarak rumah kesekolah. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi peluang untuk memperoleh mata pencaharian yang lebih baik. Hal ini tentunya akan berdampak pada tingkat pendapatan dan aksesnya terhadap pangan yang menjadi semakin lebih baik. Kondisi secara rill dan dalam persentase penduduk yang tidak tamat Sekolah Dasar (SD) tersaji pada Tabel 4.6 berikut ini.

Persentase penduduk tidak tamat SD di Kecamatan Bungku Tengah sebanyak 8,34%. Jika berdasarkan kriteria akses pangan pada aspek sosial ekonomi dari sub aspek penduduk Kecamatan Bungku Tengah tidak tamat SD termasuk dalam kategori akses pangan sangat tinggi dengan skor 100, artinya tidak ada kendala yang berarti dalam mengakses informasi tentang pangan untuk pemenuhan kebutuhan pangan sehari-hari.

4.6. Hubungan Desa dengan Pasar

Ketahanan pangan penduduk atau rumah tangga tidak hanya ditentukan oleh tersedianya pangan (jumlah dan kualitas) yang cukup untuk memenuhi kebutuhan penduduk di suatu wilayah tetapi ketahanan pangan yang nyata harus mencerminkan kemampuan penduduk (rumah tangga) untuk mengakses pangan baik di produsen maupun pasar yang ada. Pasar merupakan sarana untuk memperoleh segala macam kebutuhan manusia termasuk pangan. Selain itu pasar juga sebagai tempat bertemuanya penjual dan pembeli di mana ada transaksi jual beli. Karena akses terhadap pasar penting maka jauh dekatnya pasar dari pemukiman akan mempengaruhi tingkat akses pangan.

Oleh sebab itu, ada atau tidak adanya pasar di suatu desa akan mempengaruhi rumah tangga dalam

mengakses pangan, demikian juga waktu tempuh yang diperlukan untuk mencapai pasar juga mempengaruhi keinginan untuk mengakses pangan. Untuk itu persentase keberadaan pasar dan jarak pasar terjauh dari pemukiman siatu pedesaan merupakan tolak ukur akses pangan di suatu wilayah. Semakin sulit akses rumah tangga ke pasar (tidak ada di desa atau terlalu jauh) maka semakin rendah aksesnya terhadap pangan

Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah desa yang tidak mempunyai pasar atau jarak terdekat maksimum 3 km adalah berjumlah 2 desa atau 10,53% dari 19 desa/kelurahan yang ada di kecamatan, sehingga dari kriteria akses pangan yang digunakan dalam penelitian ini yang berarti akses pangan pada aspek konsumsi dari sub aspek hubungan desa dan pasar termasuk dalam kriteria sangat tinggi dengan skor 80, artinya masyarakat tidak mengalami kesulitan untuk memperoleh kebutuhan pangan sehari-hari.

4.7. Tingkat Kemiskinan di Setiap Desa

Akses pangan juga sangat dipengaruhi oleh daya beli rumah tangga yang merupakan fungsi dari pendapatan artinya akses pangan akan terjamin seiring dengan terjamin dan cukupnya pendapatan dalam jangka panjang. Dengan kata lain keterjangkauan pangan bergantung pada ke-sinambungan mata pencaharian. Mereka yang tidak menikmati kesinambungan dan kecukupan pendapatan tetap akan miskin. Jumlah orang miskin mencerminkan kelompok yang tidak punya akses yang cukup terhadap sumber nafkah yang produktif. Semakin besar jumlah orang miskin, semakin rendah daya akses terhadap pangan dan semakin tinggi derajat kerawanan pangan wilayah tersebut.

Menyadari bahwa banyak definisi maupun cara pengukuran kemiskinan yang berbeda-beda maka dalam penelitian ini hanya mengacu kepada data sekunder dari Kantor BKKBN dan Dinas Sosial dalam wujud penetapan keluarga miskin yang berhak menerima RASKIN (Beras Untuk Keluarga Miskin) di setiap desa pada wilayah Kecamatan Bungku Tengah. Data orang miskin penerima Raskin biasanya terlihat kontradiktif dengan pengamatan lapangan, namun kondisi seperti disebutkan sebelumnya dapat ditanggulangi dengan dasar deskriptif kemiskinan yang diterapkan di Kecamatan Bungku Tengah seperti atap rumah (rumbia/seng rusak), lantai tanah, dinding (jalajala/papan), tidak memiliki jamban dan lain sebagainya.

Jumlah penerima raskin terbanyak ada di Desa Bente sebanyak 279 KK atau sebesar 45,15% dan paling sedikit di Desa Tudua sebanyak 54 KK

(65,06%). Namun jika dilihat pada persentase penerima raskin menunjukkan bahwa Desa Bahontobungku adalah desa yang paling tinggi menerima raskin sebesar 78,20% sedangkan Desa Bahomoleo adalah desa paling sedikit menerima raskin sebesar 35,64%. Selanjutnya secara keseluruhan persentase penduduk dan penerima raskin adalah sebesar 51,50%, sehingga dari segi akses pada aspek ekonomi dari sub aspek tingkat kemiskinan termasuk dalam kriteria sangat rendah dengan score 0. Artinya dari segi konsumsi masyarakat Bungku Tengah mempunyai daya akses terhadap pangan yang tidak baik dan derajat kerawanan pangan yang sangat tinggi.

4.8. Penduduk yang Bekerja Kurang Dari 36 Jam Per Minggu

Dalam analisa akses pangan ini digunakan indikator “persentase penduduk yang bekerja kurang dari 36 jam per minggu” dengan pertimbangan hal ini akan lebih signifikan/tajam untuk menggambarkan tingkat pendapatan rumah tangga di pedesaan dibandingkan jika menggunakan persentase penduduk yang bekerja kurang dari 15 jam per minggu yang lazim digunakan terutama di daerah perkotaan karena bila menggunakan data bekerja kurang dari 15 jam per minggu di pedesaan maka yang terdata adalah pengangguran terselubung sebab sebagian besar penduduk pedesaan bekerja secara serabutan dengan upah seadanya. Namun karena biaya hidup yang relatif rendah dan sebagian besar kebutuhan pangan diproduksi sendiri oleh rumah tangga serta solidaritas kekerabatan yang masih tinggi maka kebutuhan pangan sehari-hari masih dapat teratasi dan akses pangan seolah-olah relatif masih baik padahal sesungguhnya akses pangan kemungkinan masih rentan rawan. Jadi tidak memiliki pekerjaan yang memadai merupakan cerminan tekanan ekonomi dan jika tidak ada sumber pendapatan yang memadai maka ketahanan pangan di rumah tangga tersebut akan beresiko.

Penduduk yang bekerja kurang dari 36 jam per minggu tertinggi ada di Desa Sakita sebanyak 348 jiwa dengan persentase sebesar 22,94% dan terrendah di Desa Bungi sebanyak 69 jiwa atau 9,09%). Secara keseluruhan persentase penduduk yang bekerja kurang dari 36 jam per minggu sebanyak 13,93% sehingga dari segi akses pangan pada aspek ekonomi dari sub aspek penduduk yang bekerja kurang dari 36 jam per minggu termasuk dalam kriteria tinggi dengan score 80 artinya penduduk Kecamatan Bungku Tengah relatif tidak ada masalah dalam mengakses

kebutuhan pangan sehari-hari karena pendapatan mereka relatif dianggap cukup untuk membeli kebutuhan pangan.

4.9 Pendapatan Per Kapita Per Hari Pada Produk Ekonomi Kerakyatan

Salah satu parameter atau indikator untuk mengukur/menilai daya beli masyarakat adalah tingkat pendapatan penduduk, namun karena data ini tidak tersedia maka seharusnya digunakan pendekatan melalui nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita per tahun atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha yang dikelola oleh masyarakat. PDRB per kapita adalah salah satu indikator makro yang bisa digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk di suatu wilayah dalam jangka waktu tetentu. Semakin tinggi PDRB per kapita yang diterima penduduk berarti makin tinggi kesejahteraanya. PDRB per kapita merupakan nilai PDRB di bagi jumlah penduduk pertengahan tahun disuatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. PDRB dalam penelitian ini selanjutnya diganti dengan istilah Produk Ekonomi Kerakyatan.

Penggunaan Produk Ekonomi Kerakyatan dalam analisa ini adalah dengan pengertian bahwa data PDRB lebih bersifat kewilayahan (pendapatan untuk daerah) dan tidak diukur pada tingkat kecamatan sementara untuk mengukur tingkat akses pangan lebih tepat bila dilihat dari daya beli atau pendapatan penduduk/rumah tangga sehingga disini nilai PDRB yang akan diperhitungkan hanyalah nilai dari sektor-sektor (lapangan usaha) yang dikelola oleh masyarakat yang pemasukannya untuk masyarakat jadi lapangan usaha seperti pertambangan, PLN, PDAM yang ada tidak diperhitungkan. Selanjutnya, karena dalam perhitungan mengacu pada standar FAO maka perhitungan akan disetarakan dengan US Dollar (\$), disini digunakan asumsi nilai 1 \$ adalah Rp.11.500,- dan batas pendapatan terkecil (garis kemiskinan) adalah 1.095 \$ per tahun. Semakin tinggi nilai Produk Ekonomi Kerakyatan (pendapatan per kapita) semakin baik kondisi akses pangannya.

Di Kecamatan Bungku Tengah lapangan usaha yang dikelola oleh masyarakat hanya dari sektor pertanian dalam arti luas, sektor lain adalah jasa transportasi (sopir, ojek), restoran/warung dan jenis jasa lainnya yang nilainya tidak tercatat dan atau dapat diabaikan, sehingga nilai Produk Ekonomi Kerakyatan hanya didekati melalui penjumlahan dari nilai produksi pertanian dikalikan dengan harga yang berlaku, yang selanjutnya ditulis dengan Nilai Produk Ekonomi Kerakyatan, disajikan dalam Tabel 3.

Tabel 3. Nilai Produk Ekonomi Kerakyatan Kecamatan Bungku Tengah, Tahun 2012

| No. | Nama Komoditi | Jumlah Produksi (ton) | Nilai (Juta Rupiah) |
|--------|------------------|-----------------------|---------------------|
| 1 | Padi (GKG) | 566,2 | 17.017,75 |
| 2 | Jagung | 180,6 | 5.335,94 |
| 3 | Ubi Kayu | 528 | 254,5 |
| 4 | Ubi Jalar | 63 | 90,45 |
| 5 | Kacang Tanah | 16,4 | 256,25 |
| 6 | Kacang Hijau | 6,4 | 45,6 |
| 7 | Kakao | 211 | 98,5 |
| 8 | Cengkeh | 28 | 468 |
| 9 | Kelapa | 25,15 | 25,15 |
| 10 | Jambu Mete | 56 | 320,55 |
| 11 | Ikan | 43,73 | 415,25 |
| 12 | Kambing (daging) | 7,65 | 695,5 |
| 13 | Ayam (daging) | 28,4 | 2.045,5 |
| 14 | Sapi (daging) | 3,41 | 678,4 |
| 15 | Telur (unggas) | 30,97 | 954 |
| Jumlah | | 26.919,76 | 152.227,79 |

Sumber: BPS Kabupaten Morowali 2013 (berdasarkan harga pasar)

Tabel 3 menunjukkan bahwa Nilai Produk Ekonomi Kerakyatan (sektor pertanian) adalah sebanyak Rp 152.227.790.000,- atau senilai US \$ 13.231.799,13, selanjutnya dengan jumlah penduduk tahun 2011 sebanyak 20.300 jiwa dan penduduk

tahun 2012 sebanyak 20.684 jiwa maka penduduk pertengahan tahun 2012 diperhitungkan sebesar 20.492 jiwa, dengan demikian pendapatan per kapita per tahun penduduk Kecamatan Bungku Tengah tahun 2012 adalah sebesar Rp 7.428.644,84 atau setara US \$ 645,97. Jadi pendapatan ini lebih kecil dari ambang batas kemiskinan yang disepakati sebesar US \$ 1.095 per kapita per tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa akses pangan dari segi aspek ekonomi sub aspek pendapatan, wilayah Kecamatan Bungku Tengah tergolong dalam kriteria rendah dengan skor 20.

Nilai Komposit/Gabungan Akses Pangan

Akumulasi dari seluruh kriteria dan bobot masing-masing aspek selanjutnya diperhitungkan untuk menentukan nilai komposit/gabungan akses pangan guna menyimpulkan kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah secara menyeluruh (*holistik*). Nilai komposit diperoleh dengan menjumlahkan seluruh bobot setiap aspek (sub aspek) dari komponen akses pangan dibagi dengan jumlah aspek (sub aspek).

Meskipun hasil perhitungan gabungan tergolong cukup tinggi, namun aspek ketersediaan dan akses (yang ditunjukkan oleh dan pendapatan perkapita) sangat rendah. Ketidakmampuan produksi lokal memenuhi kebutuhan penduduk perlu menjadi

Tabel 4. Nilai Komposit/Gabungan Akses Pangan di Kecamatan Bungku Tengah, Tahun 2012

| Aspek/Sub Aspek | Range | Kriteria | Bobot |
|--|--------|---------------|-------|
| Aspek Ketersediaan | | | |
| 1 Konsumsi normatif | 2,32 | Sangat Rendah | 0 |
| Aspek Distribusi | | | |
| 2 Desa yang tidak dapat dilalui roda 4 | 5,88 | Sangat Tinggi | 100 |
| Aspek Sosial Ekonomi | | | |
| 3 Penduduk yang tidak tamat SD | 8,34 | Sangat Tinggi | 100 |
| 4 Hubungan desa dengan pasar | 10,3 | Sangat Tinggi | 100 |
| 5 Penduduk miskin/penerima raskin | 51,50 | Sangat Rendah | 0 |
| 6 Penduduk kerja < 36 jam/minggu | 13,93 | Tinggi | 80 |
| 7 Pendapatan per kapita per tahun | 645,97 | Rendah | 20 |
| Jumlah | | | 400 |
| Nilai komposit gabungan | | Cukup tinggi | 57,14 |

perhatian serius. Upaya peningkatan produksi melalui perluasan areal persawahan dan intensifikasi budidaya perlu didorong untuk meningkatkan ketersediaan pangan lokal. Demikian pula diversifikasi pangan pun

perlu digalakkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap beras sekaligus meningkatkan keberdayaan petani penghasil bahan pangan lokal selain beras.

Berdasarkan data di atas, perlu adanya upaya peningkatan kemampuan masyarakat memperoleh makanan melalui berbagai cara legal, baik berupa peningkatan produksi maupun peluang ekonomi lainnya (Sen, 1989). Program Raskin seharusnya bersifat sementara. Pemberdayaan masyarakat dengan memfaatkan potensi lokal akan memberikan sumbangsih yang besar bagi ketahanan pangan wilayah.

KESIMPULAN

Penelitian ini dilaksanakan untuk menganalisis ketahanan pangan wilayah Kecamatan Bungku Tengah. Hasil penelitian menunjukkan ketahanan pangan wilayah Kecamatan Bungku Tengah secara keseluruhan dilihat dari nilai gabungan (komposit) dari tiga aspek ketahanan pangan menunjukkan bahwa ketahanan pangan belum tercapai.

Dari aspek ketersediaan bahan makanan pokok (padi, jagung, ubi kayu dan ubi jalar) Kecamatan Bungku Tengah mengalami defisit. Hal tersebut juga bila ditinjau dari ketersediaan beras ternyata Kecamatan Bungku Tengah belum swasembada beras, yaitu dengan tingkat ketersediaan sebesar 39,48 kg per kapita per tahun, artinya jauh lebih kecil dari rata-rata konsumsi beras masyarakat Sulawesi Tengah sebesar 98 kg/kapita/tahun.

Aspek distribusi yang diwakili oleh desa yang tidak dapat dilalui kendaraan roda 4 menunjukkan bahwa Kecamatan Bungku Tengah pada aspek distribusi tergolong sangat tinggi.

Aspek sosial ekonomi yang diwakili oleh penduduk yang tidak tamat SD, keberadaan pasar, penduduk miskin, penduduk kerja < 36 jam per minggu dan pendapatan per kapita menunjukkan bahwa sub aspek penduduk miskin dan pendapatan per kapita sangat rendah.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa program Raskin di Kecamatan Bungku Tengah masih dibutuhkan. Upaya peningkatan produksi pangan dapat dilakukan melalui perluasan areal persawahan dan intensifikasi produksi. Hal ini tentu saja tergantung pada tersedianya sarana pendukung yang memadai. Diversifikasi pangan perlu didorong untuk menghindari ketergantungan terhadap beras, sekaligus mendukung pemanfaatan petani penghasil pangan lokal.

Untuk pemerintah daerah dapat lebih memprioritaskan penanganan beberapa aspek yang mempunyai kriteria yang sangat jelek atau berbobot sangat rendah yaitu ketersediaan beras atau bahan makanan pokok lainnya, penduduk miskin/penerima raskin dan juga tingkat pendapatan per kapita per

tahun. Penelitian lebih mendalam perlu dilakukan mengingat waktu, dan terbatasnya akses terhadap dat untuk mendukung analisis dengan indicator yang lebih konprehensif. Survei rumah tangga akan memberikan ngambaran yang lebih lengkap tentang status ketahanan pangan di wilayah Kecamatan Bungku Tengah

DAFTAR PUSTAKA

- Andibya, B.W dkk. 2009. *Pertanian Masa Depan Kita, Sinergi BUMN Dalam BUMP (Badan Usaha Milik Petani)*. Gibon Group Publications (Gibon Books), Jakarta.
- BKP. 2005. *Kebijakan Umum Ketahanan Pangan*. Badan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian, Jakarta.
- _____. 2006c. *Evaluasi 2002 – 2005, Pemantapan 2006 dan Prospek 2007, Distribusi Pangan*. Pusat Distribusi Pangan. Badan Ketahanan Pangan. Departemen Pertanian, Jakarta.
- _____. 2006d. *Neraca Bahan Makanan Indonesia 2004 – 2005*. Badan Ketahanan Pangan. Departemen Pertanian, Jakarta.
- _____. 2008. *Analisis Akses Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara, 2008*. Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Tenggara, Kendari.
- BPS Kabupaten Morowali. 2013. *Kecamatan Bungku Tengah Dalam Angka 2012*. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.
- Burchi, F., & De Muro, P., 2016. From food availability to nutritional capabilities: Advancing food security analysis. *Food Policy*, 60, 10-19.
- Grafton, R.Q., Daugbjerg, C. & Qureshi, M.E., 2015. Towards food security by 2050. *Food Sec.* 7, 179–183. <https://doi.org/10.1007/s12571-015-0445-x>
- Halik, A. 2007. *Ketahanan Pangan Masyarakat Pedesaan (Studi Kasus Di Desa Pammusureng, Kecamatan Bonto Cani, Kabupaten Bone)*. *Jurnal Agrisistem*. Volume 3 Nomor 2 Desember 2007.
- Maturbongs, Laurentius H. 2008. *Penguatan Sistem Pangan Untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Wilayah dan Rumah Tangga Sebagai Basis Ketahanan Pangan Nasional*. *Jurnal Agroforestri*. Volume III Nomor 1 Maret 2008.
- Mubyarto. 1995. *Pengantar Ekonomi Pertanian*, cetakan ke empat. PT. Pustaka LP3ES Indonesia. Jakarta.

- Mustofa. 2010. *Analisis Ketahanan Pangan Rumah Tangga Miskin dan Modal Sosial Di Provinsi DIY*. Jurnal Sains Geografis. Volume 10 Nomor 1 Mei 2012.
- Nainggolan, K. 2008. *Melawan Kelaparan dan Kemiskinan Abad Ke-21*. Kekal Press, Bogor. Jawa Barat.
- Nuhung, IA. 2006. *Bedah Terapi Pertanian Nasional, Peran Strategis dan Revitalisasi*. PT. Buana Ilmu Populer, Kelompok Gramedia. Jakarta.
- Nugroho, R. 2004. *Reinventing Pembangunan*. Penerbit Eleks Media Komputindo, Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Qureshi, M.E., Dixon, J. & Wood, M., 2015. Public policies for improving food and nutrition security at different scales. *Food Sec.* 7, 393–403 <https://doi.org/10.1007/s12571-015-0443-z>.
- Sen, A. (1982). *Poverty and famines: an essay on entitlement and deprivation*. Oxford university press.
- Sohardjo, A dan D. Patong. 1984. *Sendi-Sendi Pokok Ilmu Usahatani*. Bina Aksara, Jakarta.
- Soekartawi. 2002. *Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Pertanian, Teori dan Aplikasi*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Soetrisno. 1998. *Ketahanan Pangan*. Prosiding Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VI. Serpong 17-20 Pebruari. LIPPI. Jakarta.
- Sumodiningrat, G dan R. Nugroho. 2005. *Membangun Indonesia Emas*. Penerbit Elex Media Komputindo, Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Tohir, K.A. 1983. *Seuntai Pengetahuan Usahatani*. Bina Aksara, Jakarta.
- Widada, A. W., Masyhuri, M., & Mulyo, J. H., 2017. Determinant factors of food security in Indonesia. *Agro Ekonomi*, 28(2), 205-219.

Lampiran 1. Indikator Analisis Akses Pangan Pada Sistem Ketahanan Pangan di Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali

| Standar | Indikator | Range | Kategori Akses Pangan | Score/Bobot |
|---------------------------------|---|---|--|----------------------------------|
| Aspek Ketersediaan | Konsumsi normatif per kapita terhadap rasio ketersediaan bersih serealia dan umbi-umbian (padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar). | 1. 1,00 – 0,84 2. 0,83 – 0,68 3. 0,67 – 0,52 4. 0,51 – 0,36 5. 0,35 – 0,20 6. < 0,19 | Sangat Rendah Rendah Cukup Rendah Cukup Tinggi Tinggi Sangat Tinggi | 0 20 40 60 80 100 |
| Aspek Distribusi | Presentase desa/kelurahan yang tidak dapat dilalui kendaraan roda empat. | 1. $\geq 30\%$ 2. 25% - <30% 3. 20% - <25% 4. 15% - <20% 5. 10% - <15% 6. < 10% | Sangat Rendah Rendah Cukup Rendah Cukup Tinggi Tinggi Sangat Tinggi | 0 20 40 60 80 100 |
| Aspek Konsumsi (Sosial-Ekonomi) | Presentase penduduk yang tidak tamat SD | 1. $\geq 50\%$ 2. 40% - <50% 3. 30% - <40% 4. 20% - <30% 5. 10% - <20% 6. < 10% | Sangat Rendah Rendah Cukup Rendah Cukup Tinggi Tinggi Sangat Tinggi | 0 20 40 60 80 100 |
| | Presentase desa yang tidak memiliki pasar dan atau jarak terdekat ke pasar > 3 km | 1. $\geq 62\%$ 2. 50% - <62% 3. 37% - <50% 4. 25% - <37% 5. 12% - 25% 6. < 12% | Sangat Rendah Rendah Cukup Rendah Cukup Tinggi Tinggi Sangat Tinggi | 0 20 40 60 80 100 |
| | Presentase penduduk hidup di bawah garis kemiskinan | 1. $\geq 35\%$ 2. 25% - <35% 3. 20% - <25% 4. 15% - <20% 5. 10% - <15% 6. < 10% | Sangat Rendah Rendah Cukup Rendah Cukup Tinggi Tinggi Sangat Tinggi | 0 20 40 60 80 100 |
| | Presentase penduduk yang bekerja < 36 jam per minggu | 1. $\geq 50\%$ 2. 40% - <50% 3. 30% - <40% 4. 20% - <30% 5. 10% - <20% 6. < 10% | Sangat Rendah Rendah Cukup Rendah Cukup Tinggi Tinggi Sangat Tinggi | 0 20 40 60 80 100 |
| | PDRB ekonomi kerakyatan per kapita (dalam \$) | 1. < 365 2. 365 - <730 3. 730 - <1095 4. 1095 - <1460 5. 1460 - <1825 6. > 1825 | Sangat Rendah Rendah Cukup Rendah Cukup Tinggi Tinggi Sangat Tinggi | 0 20 40 60 80 100 |

Sumber: Halik, 2007; BKP, 2015.